

# Dokumen

## RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

*SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA*

### I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

- A. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN
- B. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN
- C. Kerjasama Keuangan dan Perbankan  
Pembaruan Sistem Keuangan di ASEAN
- D. Kerjasama Pangan, Perikanan dan Kehutanan
  - 1. Strategi Perikanan ASEAN
  - 2. Pabrik Perikanan ASEAN
- E. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi
  - 1. Pembangunan Pabrik Garam Abu ASEAN
  - 2. Pertemuan Dewan Perminyakan ASEAN (ASCOPE)
- F. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
  - 1. Masalah Perdagangan ASEAN
  - 2. Pertemuan Para Pejabat Senior Perdagangan

### II. KERJASAMA NON EKONOMI ASEAN

- A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
  - 1. Pertemuan Kelompok Kerja Media Cetak dan Tradisional
  - 2. Pertemuan Konfederasi Wartawan ASEAN
- B. Kerjasama Keamanan ASEAN  
Sidang ASEANAPOL ke-9

### III. ORGANISASI NON PEMERINTAHAN (NGO)

- A. Pertemuan FASA ke-15
- B. Perhimpunan Hukum ASEAN (ALA)
- C. Pertemuan Informal Jaksa Agung ASEAN
- D. Pertemuan Asosiasi Penilai ASEAN
- E. Penanggulangan Bencana Alam

### IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- A. Hubungan ASEAN-Jepang
  - 1. Kerjasama Energi
  - 2. Kerjasama Kebudayaan
  - 3. Seminar "Dampak Pembentukan Pasar Baru Eropa Terhadap Peran Ekonomi Jepang di Asia Tenggara"
- B. Hubungan ASEAN-MEE
- C. Hubungan ASEAN-Kanada
- D. Hubungan ASEAN-Asia Pasifik  
Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC)
- E. Hubungan ASEAN-PBB
- F. Hubungan ASEAN-Amerika Latin

### V. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

- A. Rencana Pertemuan Perdamaian Kamboja
- B. Usaha ASEAN Lewat PBB

## I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

### A. PERTEMUAN MENTERI EKONOMI ASEAN

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-21 berlangsung di Bandar Seri Begawan tanggal 30 November-1 Desember 1989 untuk membahas: (1) usulan Australia tentang pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; (2) upaya meningkatkan hubungan perdagangan antar anggota ASEAN dan mendorong pemanfaatan pengurangan bea masuk; (3) masalah Uruguay Round yang sekarang sedang berlaku, yakni perundingan multilateral (*Angkatan Bersenjata*, 29-11-1989).

Sultan Brunei Darussalam, Hassanah Bolkia, mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN perlu menciptakan suatu era baru untuk memperluas kerjasama antar anggotanya, khususnya di bidang ekonomi; (2) inisiatif baru ke arah kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan bidang lainnya perlu dilanjutkan agar pertumbuhan ekonomi ASEAN dapat berkembang dengan pesat; (3) kemampuan ASEAN untuk mencapai posisi yang menonjol di dalam masalah regional dan internasional telah mendapat pujian dari masyarakat dunia; (4) ASEAN diharapkan dapat memainkan peranan lebih penting dalam forum internasional, termasuk bidang ekonomi; (5) pertemuan APEC di Canberra secara tidak langsung telah mengakui peranan penting ASEAN dalam kerjasama ekonomi regional, dan karenanya posisi itu harus diperkuat lagi dengan meningkatkan kerjasama ekonomi; (6) negaranya tidak terlepas dari tanggung jawab untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi; (7) Brunei mengundang para investor untuk membantu pembangunan ekonominya, terutama di sektor perindustrian (*Antara*, 1-12-1989); (8) ASEAN hendaknya menggalang kerjasama secara menyeluruh untuk menghadapi proteksi perdagangan dari negara-negara lain; (9) partisipasi ASEAN dalam pertemuan APEC di Canberra bertujuan menegakkan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan jujur, dalam kerangka semakin ketatnya proteksionisme perdagangan dewasa ini; (10) kelompok-kelompok yang terlibat dalam APEC hendaknya tidak membiarkan diri mereka tumbuh sebagai suatu blok negara dagang (*Suara Karya*, 1-12-1989).

Sementara itu Menteri Perdagangan Filipina mengatakan bahwa: (1) ASEAN perlu mengambil langkah-langkah yang lebih nyata untuk menghadapi munculnya blok-blok perdagangan di kawasan Eropa dan Amerika

Utara; (2) sebenarnya ASEAN harus kuat sebagai organisasi kerjasama di bidang ekonomi daripada bidang politik, tetapi kenyataannya lemah dalam membuat langkah-langkah yang nyata di bidang ekonomi; (3) ASEAN kuat dan berhasil dalam isu-isu politik, tetapi sangat lamban mengambil langkah-langkah yang pasti bagi pertumbuhan ekonomi (*Suara Karya*, 1-12-1989).

Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk: (1) memberi kemudahan satu sama lain agar perdagangan antar ASEAN meningkat dan makin lancar; (2) meningkatkan berbagai kerjasama ekonomi dan menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini menjadi kendala dalam kerjasama itu; (3) memperbaiki sistem perdagangan antar ASEAN dengan cara meningkatkan investasi melalui proyek usaha patungan oleh pihak swasta; (4) memperlancar proyek kerjasama dengan menghilangkan segala bentuk birokrasi yang akan menjadi penghalang; (5) menyatukan pandangan, terutama dalam memperjuangkan penghapusan proteksionisme yang sangat merugikan ekspor ASEAN pada Pertemuan Babak Uruguay bulan Desember 1990; (6) mempelajari kembali usul pembentukan Komisi Komoditi dan Komisi Energi dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-22 mendatang; (7) memperbaiki lagi kerjasamanya dan memperkuat kemampuan ekonomi kawasanya agar mampu menciptakan bentuk kerjasama baru; (8) menggiatkan perdagangan antar ASEAN dengan menambah jumlah jenis barang yang dimasukkan dalam PTA setiap tahunnya; (9) melaksanakan pembangunan proyek jaringan perhubungan antar ASEAN melalui darat, laut dan udara secara bertahap; (10) mengkampanyekan kunjungan wisatawan ASEAN 1992 ke Jepang, Australia, Jerman Barat dan ASEAN sendiri; (11) menugaskan para pejabat senior ASEAN untuk menyiapkan gagasan dan pemikiran baru yang akan dibahas dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-22 yang akan diselenggarakan di Jakarta bulan Oktober 1990 (*Merdeka*, 4-12-1989).

### B. PERTUMBUHAN EKONOMI ASEAN

Dalam wawancaranya dengan *The Straits Times*, Menteri Keuangan Singapura, Dr. Richard Hu mengatakan bahwa: (1) rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia, Filipina, Malaysia dan Muangthai (ASEAN-4) dengan cepat mengejar Negara-negara Industri Baru Asia (NICs) dan kesenjangan antar ASEAN-4 dengan NICs akan lenyap tahun ini; (2) Jepang dan NICs merupakan pemain-pemain bintang

sampai pertengahan 1980-an dan ASEAN-4 berkembang dengan cepat dengan rata-rata pertumbuhan 8% di belakang NICs pada tahun 1986 dan 2% pada tahun 1987; (3) bila berbagai investasi akhir-akhir ini diterjemahkan ke dalam produksi penuh, maka di tahun-tahun mendatang ASEAN-4 akan dilanda investasi; (4) dalam dua tahun terakhir ini investasi Jepang ke ASEAN-4 meningkat hampir dua kali lipat setiap tahunnya, dari 2,5% tahun 1986 menjadi 4,2% tahun 1987; (5) investasi AS ke NICs pada tahun 1987 naik 7% bila dibandingkan dengan tahun 1986, tetapi investasi AS ke ASEAN-4 pada periode yang sama melonjak menjadi 65%; (6) komitmen investasi NICs kepada ASEAN-4 pada tahun 1987 melebihi 33%; (7) pertumbuhan perekonomian ASEAN-4 saat ini semakin menguntungkan sektor produksi barang jadi dibandingkan dengan sektor pertambangan dan industri; (8) sumbangan bagi kestabilan ekonomi mikro ASEAN diperoleh dari tingkat inflasi yang relatif rendah dan tingkat defisit fiskal serta keberhasilan mengurangi kekurangan keuangan yang sedang berjalan; (9) keuntungan komparatif dalam produksi barang jadi yang padat karya terus mengalami kemajuan di ASEAN-4 akan mempercepat relokasi industri-industri yang sama dari NICs dan Jepang ke Asia Tenggara; (10) tingkat simpanan yang tinggi di NICs kemungkinan sekali akan terus berlanjut dan akan melayani investasi yang akan terus mengalir ke tetangga ASEAN-4; (11) tingkat pertumbuhan perekonomian dan mengalirnya investasi menggambarkan perubahan lingkungan perekonomian di kawasan Asia-Pasifik dalam tiga tahun terakhir ini; (12) dalam dekade mendatang patron investasi asing biasanya memimpin patron perdagangan akan mengubah perekonomian di Asia-Pasifik dan akan membantu perkembangan saling menguntungkan dalam perekonomian di kawasan ini (*Suara Pembaruan*, 22-11-1989).

## C. KERJASAMA KEUANGAN DAN PERBANKAN

### *Pembaruan Sistem Keuangan di ASEAN*

Pertemuan para Sarjana Ekonomi ASEAN berlangsung di Manila tanggal 18 November 1989, yang antara lain dihadiri oleh para ahli ekonomi anggota ASEAN termasuk 21 orang delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Hubungan Luar Negeri ISEI, Prof. Hendra Kusuma, untuk membahas masalah pembaruan sistem keuangan di negara-negara ASEAN.

Presiden Filipina, Qorazon Aquino mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) solidaritas

dan kekuatan merupakan tiang utama untuk menegakkan kerjasama ekonomi ASEAN; (2) anggota ASEAN secara bersama telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga termasuk sebagai negara dengan performance yang tinggi; (3) dedikasi para ahli ekonomi ASEAN yang selama ini banyak memberi sumbangan pada kemajuan ekonomi kawasan yang saling menguntungkan hendaknya diteruskan.

Dr. Amina Tyabji dari National University of Singapore mengatakan bahwa: (1) beberapa persamaan usaha pembaruan di bidang keuangan dilakukan negara-negara ASEAN antara lain untuk: (a) memobilisasikan dana masyarakat dan menempatkan secara lebih efisien dan produktif; (b) menghilangkan pengendalian harga yang dapat mengekang pertumbuhan ekonomi seperti kurs mata uang dan suku bunga; (c) mengurangi hambatan masuknya usaha baru dalam bisnis keuangan; (d) menumbuhkan pasar modal guna mengefisienkan dana; (2) deregulasi keuangan di Indonesia pada dekade 70-an dilakukan sebagai salah satu bagian dari pembaruan luas untuk mengembangkan ekonomi non-migas; (3) sejak tahun 1983 hingga sekarang Indonesia baru melaksanakan deregulasi substansial yang mengarah pada pergeseran dominasi lima bank pemerintah, peningkatan persaingan bank swasta, kebebasan menentukan suku bunga deposito dan kredit serta penggalakan pasar modal; (4) deregulasi di Indonesia tidak memperlihatkan kegoncangan moneter, kecuali dua bank jatuh. Hal ini dapat terjadi karena diikuti dengan regulasi yang lebih bijaksana agar bank memelihara keseimbangan tertentu antara modal sendiri dan pinjaman serta audit yang lebih ketat dari Bank Indonesia; (5) deregulasi di Malaysia pada dekade 70-an dengan mengembangkan kurs mata uang, banyak menimbulkan kegoncangan seperti penipuan dan kemerosotan nilai asset perbankan; (6) deregulasi tahun 1983 di Malaysia diarahkan untuk mengurangi pengendalian keluar masuknya mata uang dunia sehingga menumbuhkan pasar mata uang internasional mengakibatkan kredit macet mencapai 20-25% pada tahun 1986. Hal ini memaksa pemerintah yang pada tahun 1987 menghapus peraturan tingkat suku bunga; (7) pada tahun 1989, Malaysia terpaksa memperkuat pengendalian bank sentral, meningkatkan modal minimum bank dan membatasi kredit yang boleh dihapuskan; (8) dekade 50-an Filipina ditandai dengan represi terhadap sektor keuangan yang menimbulkan kegoncangan sehingga tidak dapat menumbuhkan pasar modal; (9) deregulasi yang dilakukan Filipina pada dekade 70-an masih bersifat ad-hoc, karena masih menekankan pada spesialisasi per kreditan; (10) deregulasi yang benar baru dimulai pada dekade 80-an

dengan paket yang lebih komprehensif yang meliputi suku bunga, integrasi sistem keuangan, syarat modal yang tinggi dan pengawasan yang intensif terhadap bank. Langkah ini berhasil menarik dana masyarakat dalam pengadaan pinjaman jangka panjang; (11) sejak tahun 1960, Singapura melihat sektor keuangan bukan sekedar pendukung pembangunan ekonomi, tetapi sebagai kekuatan tersendiri yang harus ditumbuhkan; (12) deregulasi yang sesungguhnya di Singapura terjadi pada tahun 1970-an yang berfokus pada harga kurs dan bunga serta keterbukaan pada bank baru; (13) Singapura tidak menghendaki kebebasan mutlak, oleh karena itu operasi bank baru yang berorientasi domestik dilarang, tetapi untuk melayani keuangan dari bisnis lain negara dibuka selebar-lebarnya dengan tujuan menjadikan Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dunia; (4) bank pemerintah di Singapura berhasil melopori persaingan dalam dunia perbankan dan menarik paling banyak tabungan masyarakat swasta; (15) Muangthai merupakan negara yang paling sedikit melakukan deregulasi dengan mengendalikan suku bunga dan meniadakan izin bank baru, namun akhir-akhir ini mulai dilonggarkan; (16) meskipun Bank of Thailand mendominasi perbankan, tetapi mobilisasi dana dalam negeri berjalan lancar; (17) akhir-akhir ini pemerintah Muangthai mulai mendorong tumbuhnya pasar modal untuk menyediakan pinjaman jangka panjang (*Suara Pembaruan*, 18-11-1989).

#### D. KERJASAMA PANGAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

##### 1. Strategi Perikanan ASEAN

Dirjen Perikanan RI, R. Soeprapto mengatakan pada pers di Jakarta tanggal 24 Oktober 1989 bahwa: (1) pembentukan Federasi Perikanan (AFF) dalam Sidang AFF ke-1 di Bangkok merupakan strategi yang hendak dicapai ASEAN di bidang perikanan; (2) Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang harus memanfaatkan keunggulan komparatif di bidang perikanan sehingga dapat memasok (mensuplai) ikan untuk memenuhi kebutuhan dunia; (3) hasil Sidang AFF ke-1 dapat mendorong ASEAN untuk menghimpun kekuatan ekonomi; (4) Indonesia tidak pernah melonggarkan Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hari-mau (*Antara*, 24-10-1989).

##### 2. Pabrik Perikanan ASEAN

Seminar dan Demonstrasi Mesin Serpih Es berlangsung di Jakarta tanggal 30 November 1989 untuk membahas masalah pengawetan ikan dengan serpihan es.

Sekjen Perikanan ASEAN, Woworuntu, mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) Indonesia menghendaki agar pabrik perikanan ASEAN didirikan di Indonesia, karena selain bahan ikan cukup banyak, juga dapat menyerap tenaga kerja; (2) Presiden Soeharto telah mengatakan kepada Menteri Pertanian Ir. Wardoyo agar produksi perikanan Indonesia yang diekspor ke luar negeri ditingkatkan menjadi barang jadi; (3) Indonesia baru mampu mengekspor setengah dari produksinya yang sudah diproses.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Ir. Sofyan Ilyas mengatakan: (1) salah satu sebab ekspor perikanan Indonesia ke AS ditolak karena dianggap membahayakan kesehatan; (2) pengawetan ikan dengan es harus hati-hati karena ikan yang mengandung lemak tinggi mempunyai proses penurunan mutu yang cepat; (3) untuk menghindari pembusukan, suhu ruangan penyimpanan ikan harus nol atau satu derajat; (4) hingga sekarang belum ada standar penggunaan es dalam pengawetan produksi perikanan yang berhasil baik.

Dirjen Perikanan R. Soeprapto mengatakan bahwa: (1) peningkatan penggunaan es yang memadai harus sejalan dengan peningkatan produksi; (2) es merupakan bahan pembantu yang paling pokok untuk mempertahankan mutu hasil perikanan; (3) peningkatan produksi yang bermutu baik merupakan suatu upaya agar produksi ikan dapat memenuhi standar mutu sesuai dengan keinginan konsumen dalam dan luar negeri (*Pelita*, 1-12-1989).

#### E. KERJASAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

##### 1. Pembangunan Pabrik Garam Abu ASEAN

Dalam rangka kerjasama patungan, Muangthai akan mengusulkan pembangunan sebuah usaha patungan untuk memproduksi garam abu. Proyek ini akan memerlukan dana investasi US\$250 juta, dan Muangthai akan memiliki 13 saham dari US\$18 juta, sedangkan saham lainnya diperuntukkan bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya (*Antara*, 9-11-1989).

## 2. Pertemuan Dewan Perminyakan ASEAN (ASCOPE)

Konperensi dan Pameran Dewan Perminyakan ASEAN (ASCOPE) ke-15 berlangsung di Singapura tanggal 14-16 November 1989, dihadiri oleh 300 orang dari 26 negara untuk membahas 66 makalah (*Angkatan Bersenjata*, 17-11-1989).

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Brigadir Jenderal Lee Hsien Loong, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) cadangan minyak yang terdapat di seluruh negara anggota ASEAN yang telah terbukti adalah 12.700 juta barrel atau sekitar 35% dari seluruh cadangan minyak yang terdapat di kawasan Asia-Pasifik; (2) peranan negara produsen minyak anggota ASEAN di pasaran minyak dunia cukup besar dan kemampuan produksi mereka saat ini mencapai 1,9 juta barrel per hari, sedangkan kilangnya mampu mengolah minyak mentah sebanyak 2,2 juta barrel; (3) cadangan gas alam di ASEAN mencapai 150 triliun kaki kubik atau 50% dari total seluruh cadangan gas alam yang terdapat di wilayah Asia-Pasifik; (4) Indonesia dan Malaysia merupakan negara produsen dan pengekspor minyak mentah dan gas alam yang cukup besar; (5) total produksi gas alam Indonesia mencapai 1,7 triliun kaki kubik per tahun dan 54% di antaranya diolah menjadi gas alam cair (LNG) dan LPG; (6) Indonesia merupakan negara pengekspor LNG terbesar di dunia dengan kilang pengolahan yang mampu mengolah 22,5 juta ton per tahun dan 20 juta ton di antaranya diekspor; (7) tujuan ekspor LNG Indonesia terutama ke Jepang (16 juta ton), Korea Selatan (2,1 juta ton) dan mulai tahun 1990 ke Taiwan (1,5 juta ton) (*Antara*, 21-11-1989).

Direktur Utama Perusahaan Minyak Nasional Malaysia, Tan Sri Datuk Azian Bin Zainul Abidin, mengatakan bahwa: (1) cadangan minyak Malaysia yang sudah diketemukan mencapai sekitar 3,1 milyar barrel dan berdasarkan tingkat produksi dewasa ini cadangan itu mampu memproduksi selama 15 tahun; (2) cadangan gas alam negaranya sekitar 53 triliun kaki kubik dan sejak 1985 telah diekspor ke Jepang; (3) sejak bulan Juni 1989, Malaysia telah membangun sistem penyaluran gas alam melalui pipa sepanjang 730 kilometer yang diperkirakan selesai pada bulan Oktober 1991; (4) jika proyek ini selesai maka sebagian besar pembangkit listrik di Semenanjung Malaysia dapat dialihkan dari energi BBM ke energi gas alam.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Brunei Darussalam, Dato Seri Laila Jasa Haji Ahmad Wally Skin-

ner, mengatakan bahwa: (1) produksi minyak mentah negaranya saat ini hanya 150.000 barrel per hari, meskipun kemampuan produksinya jauh di atas tingkat produksi itu; (2) pada tahun 1979 Brunei mampu memproduksi sebanyak 261.000 barrel minyak, tetapi tingkat produksi itu dibatasi dengan alasan untuk konservasi energi di dalam negeri; (3) ekspor LNG Brunei ke Jepang hingga tahun 1988 mencapai 250 juta metrik ton yang merupakan tindak lanjut kontrak jual beli jangka panjang selama 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 1993.

Ketua Dewan Direksi Pengelola Perminyakan Muangthai, Dr. Anat Arbhahirama, mengatakan: (1) total kebutuhan minyak negaranya sekitar 400.000 setara barrel, yang 120.000 setara barrel di antaranya dipenuhi sendiri, baik dari minyak mentah, kondensat maupun gas alam; (2) cadangan gas alam Muangthai mencapai 2.300 juta setara barrel minyak, dan 2.100 juta setara barrel minyak di antaranya merupakan cadangan potensi; (3) Muangthai sedang memperbaiki dan memperluas kapasitas kilang minyaknya agar pada tahun 1994 mampu mengolah minyak mentah antara 100.000 hingga 150.000 barrel per hari; (4) sejak tahun 1971 hingga 1988, Muangthai telah melakukan 291 pengeboran, dan baru 167 pengeboran yang telah menghasilkan dan memproduksi minyak.

Direktur Utama Perusahaan Minyak Nasional Filipina, Manuel A. Estrella mengatakan bahwa konsumsi energi negaranya saat ini mencapai 110 juta barrel atau sekitar 305.000 setara barrel minyak, yang 37% di antaranya dipenuhi sendiri yang sebagian besar di antaranya berasal dari energi panas bumi (*Antara*, 21-11-1989).

Mereka sepakat untuk: (1) terus meningkatkan kerjasama perminyakan antar anggota ASCOPE; (2) meneruskan pertukaran informasi dalam beberapa masalah perminyakan di antaranya untuk saling mengisi, jual beli dan membantu, baik di bidang produksi dan penjualan minyak mentah maupun hasil produksi kilang, serta saling mengirimkan data terakhir mengenai kegiatan produksi dan eksplorasi migas di antara negara anggota; (3) mempelajari aspek ekonomi dan teknik kemungkinan dibangunnya pemasokan gas alam melalui sistem pipanisasi di wilayah ASEAN; (4) mempelajari aspek ekonomi untuk memaksimalkan penggunaan okta-ne kendaraan bermotor; (5) menyelenggarakan kursus, latihan, pertukaran tenaga ahli dan serangkaian penelitian di bidang BBM, minyak pelumas dan mesin-mesin perminyakan; (6) menyelenggarakan Pertemuan ASCOPE ke-16 di Indonesia pada bulan November 1990. Di samping itu juga dicatat kemajuan kerjasama

di bidang: (1) proyek perminyakan yang pengembangannya telah selaras dengan kemajuan teknologi perminyakan, terutama dalam kerjasama pencarian prospek sumber daya mineral di lepas pantai; (2) pendidikan dan latihan bagi tenaga ahli perminyakan, baik melalui seminar, kursus singkat maupun program pertukaran tenaga ahli; (3) proyek kerjasama pengembangan industri cylinders bahan bakar gas (CNG); (4) prospek pengembangan pabrik aromatik di wilayah ASEAN; (5) pengembangan latihan manajemen keselamatan dan lingkungan hidup (*Angkatan Bersenjata*, 17-11-1989).

## F. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

### 1. Masalah Perdagangan ASEAN

Sesuai diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 28 November 1989, Menteri Perdagangan RI, Arifin Siregar, mengatakan bahwa: (1) nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN masih kecil (hanya sekitar US\$2 milyar) bila dibandingkan dengan nilai total ekspor Indonesia (US\$19 milyar/tahun) dan hanya US\$57 juta yang menikmati PTA (*Preferential Trading Arrangement*) atau pengurangan bea masuk dalam setahun; (2) perbaikan hubungan perdagangan antara negara-negara ASEAN belum mencapai apa yang diharapkan; (3) masih terdapat perbedaan-perbedaan antara negara-negara ASEAN mengenai masalah yang dianggap penting; (4) dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu jumlah barang Indonesia yang dikenakan pengurangan bea masuk barang-barang ekspor antar negara-negara ASEAN mengalami kenaikan senilai US\$9 juta, tetapi jumlah itu sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN; (5) Indonesia hanya menikmati 12.000 jenis barang yang mendapat PTA, tetapi dari jumlah itu banyak yang kurang berarti bagi Indonesia; (6) untuk meningkatkan hubungan perdagangan antar negara ASEAN, Indonesia menginginkan peninjauan kembali jumlah kandungan lokal produk setempat yang berkaitan dengan penentuan komoditi yang memperoleh PTA; (7) Indonesia menginginkan agar ketentuan komoditi yang memperoleh PTA dari minimal penggunaan bahan lokal (*local contents*) dapat ditingkatkan dari 30% hingga 50% menjadi 40% hingga 62%; (8) pada tahap pertama di berlakukannya *local contents*, Singapura lebih banyak menikmati keuntungan, tetapi sekarang telah dinikmati oleh semua negara ASEAN; (9) Indonesia akan menawarkan kepada Malaysia dan Singapura agar mengim-

por bahan baku kebutuhan mereka dari Indonesia, karena selama ini diimpor dari Eropa (*Suara Karya*, 29-11-1989).

### 2. Pertemuan Para Pejabat Senior Perdagangan

Pertemuan para Pejabat Senior Perdagangan ASEAN berlangsung di Yogyakarta tanggal 5-6 Desember 1989 untuk membahas: (1) masalah pengaturan perdagangan tekstil dunia berdasarkan persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (GATT); (2) upaya memperbaiki penilaian komoditi tekstil di pasar dunia terutama di negara-negara berkembang; (3) sikap bersama untuk menghadapi Babak Uruguay (*Jakarta Post*, 15-12-1989).

Hasil pertemuan antara lain: (1) mereka menyetujui usul Muangthai tentang diberlakukannya suatu masa transisi sebelum memasuki persetujuan tekstil yang baru setelah berlakunya pengaturan multi serat (MFA) selesai tahun 1991. Lama masa transisi sebelum memasuki kembali persetujuan tekstil dunia seperti MFA yang berlaku atas dasar Persetujuan Tarif Perdagangan atau GATT adalah 5-10 tahun; (2) mereka sependapat bahwa perubahan mendadak dalam membebaskan perdagangan tekstil akan berdampak negatif terhadap perdagangan tekstil dunia; (3) mereka menyetujui perdagangan tekstil dunia agar diatur oleh GATT karena akan memungkinkan peningkatan 6% per tahun; (4) negara pengekspor agar diperkenankan melaksanakan peningkatan di atas 10% dalam setiap kuota yang tidak dipakai dalam tahun depan; (5) negara pengekspor diijinkan melaksanakan peminjaman sampai 20% sesudah tahun kuota yang digunakan khusus dalam setiap tahun; (6) hasil yang dibuat dari bahan tekstil tidak dimasukkan dalam sistem kuota; (7) mereka menunjuk Indonesia sebagai wakil ASEAN dalam GATT untuk merundingkan usul ASEAN dengan kelompok perunding tekstil GATT (*Merdeka*, 13-12-1989).

## II. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

### A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

#### 1. Pertemuan Kelompok Kerja Media Cetak dan Tradisional

Pertemuan Kelompok Kerja Media Cetak dan Tradisional (KKMCT) ke-5 berlangsung di Yogyakarta

tanggal 13-15 November 1989 untuk: (1) merumuskan kemungkinan bentuk kerjasama antar media cetak atau penerbitan; (2) membahas proyek peningkatan kemampuan jurnalistik wartawan ASEAN.

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) berbagai proyek kerjasama bidang media cetak dan tradisional ASEAN diharapkan segera dikembangkan; (2) diperlukan proyek-proyek khusus untuk meningkatkan kemampuan wartawan dan penyatuan langkah untuk menghadapi pers asing yang beroperasi di ASEAN; (3) fungsi khusus KKMCT adalah menerapkan gagasan kerjasama seperti yang tercantum dalam keputusan Sidang para Menteri Penerangan ASEAN ke-1 bulan Mei 1989; (4) saling membagi pengalaman mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan negara anggota ASEAN dengan pandangan untuk saling meningkatkan hubungan saling menguntungkan merupakan langkah yang baik; (5) peningkatan kemampuan wartawan dapat dilakukan dengan mengembangkan kesadaran ASEAN berdasarkan keperluan meningkatkan dan menjaga kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kerjasama dan kebersamaan yang lebih besar; (6) kelompok kerja perlu mencari cara dan perangkat untuk melaksanakan keputusan para Menteri ASEAN secara efektif; (7) Penghargaan Tahunan Jurnalisme ASEAN diberikan kepada wartawan yang terpilih di antara enam negara anggota ASEAN yang menghasilkan karya terbaik mengenai gagasan ASEAN tentang kesatuan dan kebersamaan ASEAN, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta sumber daya manusia; (8) Asosiasi Penerbit ASEAN diharapkan dapat dibentuk secepat mungkin agar media cetak dapat mengurus kebutuhan pokoknya; (9) Konfederasi Wartawan ASEAN dapat mengambil bagian dalam penerapan keputusan mengenai pembentukan Asosiasi Penerbit ASEAN; (10) gagasan pembentukan Asosiasi Penerbit ASEAN pernah dikemukakan oleh beberapa penerbit dari negara ASEAN pada tahun 1980, tetapi sampai sekarang belum dapat terlaksana (*Kompas*, 14-11-1989).

Pertemuan sepakat untuk: (1) menyelenggarakan Pertemuan KKMCT ke-6 di Indonesia tahun 1990; (2) mengadakan lokakarya dan seminar ke-4 yang dihadiri oleh wartawan-wartawan kantor-kantor berita negara anggota ASEAN dan organisasi pers yang terkait; (3) mengadakan Program Pertukaran Wartawan Negara Anggota ASEAN ke-4; (4) memberikan penghargaan kepada karya jurnalistik terbaik ASEAN; (5) mengadakan program pertukaran para pejabat penerangan anggota ASEAN; (6) menyelenggarakan pertemuan para

pejabat penerangan negara anggota ASEAN untuk khusus membahas pers asing; (7) mengadakan latihan untuk mengembangkan media cetak dan tradisional di negara anggota ASEAN; (8) menyelenggarakan Konferensi para Pemimpin Media Cetak ASEAN; (9) menyelenggarakan program latihan wartawan kantor berita ASEAN; (10) mengadakan penelitian tentang dampak pemberitaan kantor berita negara anggota ASEAN di lingkungan negara sekitar kawasan; (11) mengadakan lokakarya para wartawan ASEAN yang membidangi pariwisata (*Antara*, 16-11-1989).

Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) Departemen Penerangan RI, Janner Sinaga, mengatakan kepada pers di Yogyakarta tanggal 15 November 1989 bahwa: (1) untuk melaksanakan hasil pertemuan itu diperlukan dana US\$735 juta/tahun; (2) pembinaan terhadap pers asing di luar ASEAN diperlukan agar warna pemberitaannya dapat memahami kepekaan nilai-nilai budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa ASEAN; (3) selama ini persepsi pers asing di negara-negara anggota ASEAN terhadap nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan tuan rumah kurang tepat sehingga sering menimbulkan ganjalan (*Antara*, 16-11-1989).

## 2. Pertemuan Konfederasi Wartawan ASEAN

Pertemuan Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) ke-8 berlangsung di Singapura tanggal 28 November-2 Desember 1989 dihadiri oleh 20 organisasi internasional termasuk mitra CAJ di Jepang, Eropa, AS, Kanada, Australia dan Hongkong untuk membahas: (1) masalah media massa di Asia-Pasifik; (2) perkembangan kerjasama wartawan dan persuratkabaran di ASEAN.

Menteri Penerangan dan Komunikasi Singapura, Dr. Yeo Ning Hong, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) segenap wartawan ASEAN agar mencari bentuk sistem jurnalistik yang sesuai dengan kemajuan bangsa dan negara ASEAN; (2) sistem jurnalistik yang dikenal selama ini, baik gaya Barat maupun gaya komunis, tampaknya telah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan di negara ASEAN; (3) gaya dan bentuk demokrasi yang dijalankan di Jepang selama ini membuat negara itu tidak sekedar menghasilkan dan memperdagangkan barang, tetapi juga berhasil memajukan demokrasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada untuk turut dikembangkan; (4) bangsa-bangsa Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura sudah maju, sementara Indonesia, Malaysia dan Muangthai mulai mencapai tingkat pertum-

buhan yang baik; (5) wartawan ASEAN dapat menciptakan gaya serta sistem persnya sendiri karena selain para leluhurnya telah mengetahui seni dan budaya yang tinggi sebelum masyarakat Barat mengetahuinya, faktor nilai dan moral bangsa ASEAN juga telah dapat ditegakkan sebagai tonggak dari masyarakat yang kukuh; (6) wartawan ASEAN akan tetap memegang teguh sikap, pandangan dan tanggung jawabnya atas bangsa dan negaranya. Tanggung jawab atas kemajuan dapat dicapai apabila setiap pribadi wartawan menyadari kedudukannya, tidak saja sebagai pribadi tetapi juga merupakan bagian dari anggota masyarakatnya (*Antara*, 19-11-1989).

Sementara itu Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan bahwa: (1) pers dan wartawan ASEAN agar bersama-sama berperanan menyatukan aspirasi masyarakat; (2) pers dan wartawan ASEAN harus memantapkan fungsinya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang; (3) sistem pers yang dikembangkan di kawasan ASEAN adalah sistem kebersamaan, dan tidak mengenal pers yang semata-mata hanya sebagai penjaga demokrasi; (4) sistem pers ASEAN merupakan salah satu unsur pendukung pembangunan yang sangat potensial untuk membawa masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan; (5) prinsip-prinsip pers ASEAN adalah untuk menjaga dan memelihara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial, hubungan regional dan pengembangan sumber daya manusia; (6) pers ASEAN agar memiliki peranan dan tanggung jawab untuk terus mengembangkan hubungan positif dan meningkatkan solidaritas di antara negara anggotanya; (7) pers ASEAN agar terus meningkatkan kepekaan untuk menangani isu-isu yang dapat mempengaruhi solidaritas ASEAN (*Kompas*, 1-12-1989).

Seusai pertemuan, Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Komunikasi dan Penerangan Singapura, Dr. Yeo Ning Hong, untuk menandatangani *memorandum of understanding* di bidang siaran dan penerangan antara Indonesia dan Singapura yang memuat kesepakatan untuk: (1) lebih meningkatkan kerjasama di bidang penerangan dan informasi melalui pertukaran film atau material rekaman; (2) mengadakan kunjungan bagi petugas-petugas dan artis-artis radio, televisi dan film serta pejabat-pejabat penerangan; (3) mengadakan program latihan di bidang radio, televisi, kewartawanan dan media cetak; (4) saling tukar-menukar laporan pers

dan publikasi liputan kegiatan pembangunan di negara masing-masing (*Kompas*, 1-12-1989).

Pertemuan itu sepakat agar CAJ: (1) lebih meningkatkan perannya guna mempererat kerjasama di bidang pengembangan profesi wartawan; (2) turut menyukseskan pembangunan, kesejahteraan dan membina stabilitas keamanan kawasan ASEAN; (3) memiliki bentuk dan gaya jurnalistik yang selaras dan sesuai dengan kedudukan dan peranan wartawan di kawasan ASEAN; (4) tidak mengikuti gaya dan bentuk pers Barat; (5) menyadari bahwa nilai budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat ASEAN memberikan peranan yang berarti dan nilai tambah yang memungkinkan pers di kawasan ASEAN dapat menjalankan fungsi dan peranannya dalam masyarakat; (6) menerima baik laporan Ketua Umum masing-masing anggota tentang segala sesuatu yang menyangkut pers dan kewartawanan di negara masing-masing; (7) menerima baik laporan Sekretariat Tetap CAJ di Jakarta; (8) menerima usul Ketua PWI Sugeng Wijaya tentang: (a) rencana Lokakarya "Kunjungan ASEAN 1992" guna menyongsong HUT ASEAN ke-25; (b) mengadakan seminar dengan tema "Penerbangan ASEAN dalam Rangka Menghadapi Perkembangan dan Pertumbuhan Kawasan Asia-Pasifik 1992"; (c) rencana peningkatan ketrampilan wartawan; (9) tawaran kerjasama dari Jepang, Jerman Barat, AS, Kanada, India dan Australia untuk membantu peningkatan profesi dan keterampilan wartawan, serta kunjungan peninjau jurnalistik; (10) penunjukan Ivan Lim dari Singapura sebagai Presiden CAJ periode 1990-1991 dan mengadakan Pertemuan CAJ ke-9 di Bangkok (*Antara*, 4-2-1989).

Sekembalinya dari Singapura Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan kepada pers di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 2 Desember 1989 bahwa: (1) sebuah penerbitan bersama ASEAN perlu dibentuk untuk memperkukuh dan memperjuangkan tujuan pendirian CAJ guna mengembangkan citra ASEAN di mata internasional. PM Singapura Lee Kuan Yew, serta masyarakat Singapura sangat mendukung gagasan itu dan negara-negara anggota ASEAN lainnya juga akan mendukungnya; (2) pembentukan penerbitan ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat perhimpunan ASEAN yang diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi pula; (3) badan ini berguna untuk mengimbangi derasnya arus informasi dari pers Barat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan isinya yang tidak seimbang, hanya melihat kepentingan mereka; (4) penerbitan itu diharapkan dilakukan oleh kalangan swasta dengan menggunakan wartawan ASEAN yang

terbaik dan menggunakan bahasa Inggris; (5) bentuk isi penerbitan boleh mengkritik pemerintah, tetapi harus bersifat konstruktif dan berpegang pada kode etik CAJ; (6) kerjasama komunikasi dan penerangan ASEAN harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang yang semakin berat; (8) penandatanganan *memorandum of understanding* di bidang penerangan antara Indonesia dan Singapura merupakan sejarah yang penting karena selain baru pertama kali, juga memberi isi dan bobot bagi hubungan kedua negara di masa mendatang (*Kompas*, 4-12-1989).

Presiden Soeharto mengatakan kepada Menteri Penerangan Harmoko di Bina Graha tanggal 5 Desember 1989 bahwa: (1) kerjasama di bidang penerangan perlu terus dikembangkan sehingga memberikan sumbangan untuk memperkuat ketahanan nasional dan regional; (2) dengan kerjasama penerangan ASEAN, diharapkan tercipta suatu peningkatan usaha untuk meningkatkan isi dan program siaran terutama dalam melestarikan budaya ASEAN (*Kompas*, 6-12-1989).

### B. KERJASAMA KEAMANAN ASEAN

#### Sidang ASEANAPOL ke-9

Sidang para Kepala Kepolisian Negara ASEAN ke-9 berlangsung di Denpasar tanggal 3-6 November 1989, dihadiri oleh 32 orang dari seluruh anggota ASEAN untuk membahas: (1) upaya memerangi berbagai jenis kejahatan yang menonjol di ASEAN seperti kejahatan ekonomi, uang palsu, penyelundupan narkotika, senjata api dan bahan peledak; (2) perdagangan bayi.

Menteri Pertahanan Keamanan L.B. Moerdani mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) pada hakikatnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hubungan ASEANAPOL adalah permasalahan keamanan, tetapi bukan keamanan dalam pengertian pertahanan keamanan terhadap ancaman dari luar yang mengancam kelangsungan hidup negara; (2) ASEANAPOL tidak diartikan sebagai suatu kerjasama regional dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam arti strategik dan militer; (3) ASEANAPOL bukan merupakan suatu lembaga kerjasama untuk menuju terciptanya suatu pertahanan dan keamanan atau pakta militer; (4) pertemuan diharapkan memberikan sumbangan bagi peningkatan saling pengertian di antara rakyat ASEAN; (5) ASEANAPOL merupakan refleksi dan manifestasi dari meluasnya serta meningkatnya intensitas kerjasama regional dalam rangka ASEAN; (6) meningkatnya

intensitas kerjasama ASEAN semakin mendorong meningkatnya interaksi dan komunikasi antar negara ASEAN dan rakyat ASEAN dan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peningkatan kesadaran serta sosialisasi cita-cita yang pada gilirannya akan memupuk persatuan dan solidaritas ASEAN; (7) ASEANAPOL penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul, seperti kemungkinan kegiatan penyelundupan, pelintas batas secara gelap, perdagangan obat terlarang dan kegiatan melanggar hukum lainnya, termasuk dalam segala bentuk dan tingkatan (*Angkatan Bersenjata*, 3-11-1989).

Seusai menutup Pertemuan ASEANAPOL ke-9, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi mengatakan kepada pers bahwa: (1) kasus perdagangan bayi yang merupakan tindakan tidak manusiawi kini mulai menunjukkan perkembangan yang meningkat; (2) Kepolisian RI dan Serawak baru-baru ini berhasil mengungkapkan kasus perdagangan bayi; (3) banyak faktor yang melatarbelakangi penyelundupan dan perdagangan bayi, oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam (*Suara Karya*, 7-11-1989).

Mereka sepakat untuk: (1) memerangi kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan perbankan dan uang palsu serta meningkatkan upaya preventif dan represif terhadap kejahatan penyelundupan narkotika serta penyelundupan senjata api dan bahan peledak; (2) tukar-menukar personil guna meningkatkan kemampuan kepolisian melalui pendidikan atau program-program lain yang diadakan bersama di negara-negara ASEAN; (3) mengadakan pertukaran daftar penjahat yang dianggap berbahaya atau sangat diminatkan perhatiannya untuk ditangkap; (4) saling tukar-menukar informasi nama-nama pejabat di lingkungan kepolisian masing-masing agar dalam situasi yang mendesak dapat segera dihubungi; (5) mengembangkan solidaritas antar kepolisian anggota ASEAN; (6) mengadakan Sidang ASEANAPOL ke-10 tahun 1990 di Malaysia (*Angkatan Bersenjata*, 7-11-1989).

### III. ORGANISASI NON-PEMERINTAHAN (NGO)

#### A. PERTEMUAN FASA KE-15

Pertemuan FASA ke-15 berlangsung di Jakarta tanggal 20-21 November 1989 untuk membahas proyek-proyek yang telah dikerjakan selama ini dan serah terima jabatan Ketua FASA dari Indonesia kepada Malaysia (*Business News*, 22-11-1989).

Menteri Perhubungan RI, Ir. Azwar Anas, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) meningkatnya hubungan ekonomi antara negara-negara ASEAN akhir-akhir ini menuntut perlunya fasilitas angkutan sesama anggota pelayaran ASEAN; (2) FASA sangat bermanfaat bagi ASEAN dan semakin dirasakan keberadaannya (*Angkatan Bersenjata*, 21-11-1989).

Seusai pembukaan pertemuan, Ketua FASA Hartoto Hardikusumo menegaskan kepada pers bahwa: (1) anggota FASA masih tetap sepakat untuk melakukan kerjasama untuk menghadapi pelayaran negara-negara maju, terutama pasaran tunggal Eropa; (2) FASA telah melakukan berbagai kegiatan bersama untuk saling memanfaatkan potensi armada atau pengalaman masing-masing negara anggota ASEAN; (3) banyak negara-negara Asia-Pasifik ingin masuk menjadi anggota FASA; (4) kerjasama FASA yang konkrit ialah tukar-menukar informasi dan saling membantu dalam pendidikan dan latihan (*Angkatan Bersenjata*, 21-11-1989).

Pertemuan sepakat: (1) agar dana pembangunan kapal-kapal untuk pelayaran ASEAN diangkat dalam Pembicaraan Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN ke-19; (2) untuk lebih memperhatikan kepentingan dan pelaksanaan Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN tentang pelayaran dan perkapalan; (3) untuk mengamankan angkutannya masing-masing secara nasional dalam kerangka kerjasama FASA agar tidak selalu dimakan oleh armada angkutan internasional; (4) untuk membuat resolusi kepada pemerintah AS agar tidak melarang kapal-kapal berbendera Panama memasuki pelabuhan di AS; (5) menunjuk Arifin dari Asosiasi Pelayaran Malaysia (MASA) sebagai Ketua FASA dan Miquel A. Magsaysay dari Asosiasi Pelayaran Filipina (FSA) sebagai wakilnya, sedangkan Hartoto dari Indonesia (INSA) sebagai penasihat (*Angkatan Bersenjata*, 23-11-1989).

## B. PERHIMPUNAN HUKUM ASEAN (ALA)

Pertemuan ALA ke-9 berlangsung di Denpasar tanggal 6-10 Desember 1989, dihadiri oleh 300 orang dari anggota ASEAN untuk membahas masalah lisensi, hukum internasional dan kerjasama pendidikan hukum serta harmonisasi pembangunan hukum ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 18-11-1989).

Ketika menerima Pengurus Komite Nasional Indonesia dan Komite Organisasi Perhimpunan Hukum ASEAN di Istana Wakil Presiden, Wapres Sudharmono

mengatakan bahwa: (1) anggota ASEAN agar mencari dan mengembangkan kesamaan nilai hukum di bidang perdagangan serta mencari kekuatan dengan semangat ASEAN untuk menghadapi negara-negara saingan; (2) ASEAN hendaknya tidak terpecah-pecah serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat kompetitif, karena pada umumnya negara-negara ASEAN menjual komoditi yang sama; (3) kesamaan itu agar dijadikan pendorong untuk mendapatkan kesatuan pendapat dalam rangka melakukan dialog dengan negara-negara maju; (4) harmonisasi hukum ASEAN diperlukan agar dapat mengurangi perbedaan yang menonjol dan sifat yang kompetitif (*Antara*, 16-11-1989).

Ketua KNI, Purwoto S. Gandasubrata, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 November 1989 bahwa: (1) masing-masing negara anggota ASEAN mempunyai sistem hukum yang berbeda; (2) ALA sedang berusaha menciptakan harmonisasi pembangunan hukum di kawasan ASEAN agar perbedaan sistem hukum yang dianut masing-masing negara anggota tidak menjadi penghambat pembangunan mereka; (3) selama ini upaya harmonisasi ditekankan pada bidang-bidang yang praktis dan banyak menyangkut bidang ekonomi karena sebagian besar negara anggota ASEAN mempunyai hasil komoditi yang hampir serupa; (4) upaya menciptakan harmonisasi selama ini tidak menghadapi masalah karena yang dibahas bukan masalah yang sangat sensitif, seperti hukum perkawinan masing-masing negara, melainkan masalah perpajakan; (5) dalam kerjasama hukum masing-masing negara dapat mempelajari perkembangan hukum yang ada di negara lainnya (*Antara*, 16-11-1989).

Keputusan-keputusan yang dihasilkan antara lain: (1) merekomendasikan kepada pemerintah negara anggota masing-masing agar mereka membuat peraturan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang dapat dieksekusi di tiap-tiap negara anggota sesuai asas resiprositas; (2) sepakat mendirikan semacam akademi hukum perbandingan ASEAN sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan hukum negara-negara anggota ASEAN; (3) sepakat melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi suatu kasus di negara di mana saksi bertempat tinggal; (4) sepakat menggunakan sistem komputerisasi data hukum dan saling tukar menukar data tentang daftar registrasi hak paten; (5) menghimbau pemerintah masing-masing negara anggota untuk membuat peraturan di bidang hukum dagang dan ekonomi; (6) menunjuk Purwoto S. Gandasubrata SH dan Prof. Dr. Komar Kantaatmadja SH sebagai Presiden dan Sekjen ALA yang baru; (7) Pertemuan ALA ke-6 akan diselenggara-

kan di Manila tahun 1992 (*Suara Pembaruan*, 11-11-1989).

### C. PERTEMUAN INFORMAL JAKSA AGUNG ASEAN

Pertemuan Informal para Jaksa Agung ASEAN berlangsung di Denpasar, tanggal 9 Desember 1989, dihadiri oleh Jaksa Agung Muangthai Prof. Dr. Komain Bhatarabiron, Jaksa Agung Brunei Darussalam, Pengiran Haji Bahrin Bin Pengiran Haji Abbas, Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Abu Thalib Bin Othman, Jaksa Agung Singapura, Tan Boon Teik, Jaksa Agung Indonesia, Sukarton Marmosudjono selaku tuan rumah, dan Jaksa Agung Filipina berhalangan hadir karena keadaan negaranya (*Suara Pembaruan*, 12-11-1989).

Seusai pertemuan, Jaksa Agung, Sukarton Marmosudjono mengatakan kepada pers bahwa: (1) pertemuan berniat menggalang dan meningkatkan kerjasama di bidang hukum; (2) mereka sepakat agar materi kerjasama di bidang hukum dituangkan secara lebih konkrit pada pertemuan formal para Jaksa Agung ASEAN; (3) pertemuan menetapkan agar materi kerjasama lebih dulu dibahas oleh para pejabat senior kejaksaan ASEAN pada tahun 1990 di Brunei Darussalam; (4) mereka sepakat mengenai perlunya kerjasama hukum, meskipun sistem hukum antar-negara ASEAN berbeda, serta saling tukar menukar informasi lewat telepon untuk hal-hal yang dianggap perlu; (5) mereka merasakan kesamaan untuk memerangi kejahatan guna menegakkan hukum di negara masing-masing; (6) kemajuan teknologi dan perekonomian di negara-negara ASEAN diperkirakan akan pula membawa dampak kejahatan, seperti kejahatan perdagangan yang memerlukan kerjasama penegakan hukum untuk mengatasinya; (7) pertemuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kejahatan yang bersifat internasional (*Suara Pembaruan*, 12-12-1989).

### D. PERTEMUAN ASOSIASI PENILAI ASEAN

Pertemuan para Pengusaha Jasa Penilai ASEAN (*ASEAN Valuers Association* atau AVA) ke-5 berlangsung di Manila tanggal 29 November-2 Desember 1989, diikuti oleh 300 orang dari wakil-wakil ASEAN serta utusan-utusan Kanada, Jepang dan PBB sebagai peninjau, untuk membahas masalah: (1) pembentukan Sekretaris Jenderal permanen AVA; (2) penerbitan bulletin berkala untuk informasi (*Merdeka*, 2-12-1989).

Ketua I Asosiasi Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPI), Ir. Doli Diapari Siregar, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 6 November 1989 bahwa: (1) delegasi Indonesia akan berupaya menggambarkan kemajuan ekonomi yang telah dicapai untuk menarik investor asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia; (2) keberhasilan Indonesia mengantisipasi penurunan pendapatan dari ekspor non-migas serta berbagai kebijaksanaan deregulasi pemerintah akan merupakan daya pikat bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor properti industri, properti residensi, komersial atau non-urban; (3) kesempatan berusaha di bidang perhotelan sangat besar karena sedang digalakkan oleh pemerintah guna mengejar ketinggalan dari Singapura dan Muangthai; (4) kini tiba saatnya bagi pemerintah untuk membuat suatu undang-undang yang mengatur jasa penilai; (5) belum disertakannya jasa penilai dalam proses penentuan suatu perusahaan yang akan melakukan *go public* melalui pasar modal akan memunculkan tanda tanya bagi para investor pembeli saham mengenai berapa besar sebenarnya nilai kekayaan dari perusahaan itu (*Merdeka*, 7-11-1989).

Ketua Dewan Pengarah AVA dari Indonesia, Dr. J.B. Kristiadi, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 1 Desember 1989 bahwa: (1) Dewan Pengarah AVA masing-masing negara terdiri dari dua unsur pemerintah dan dua dari swasta. Dewan Pengarah dari Indonesia terdiri atas Direktur Pembinaan Anggaran Lain-lain dan Kekayaan Negara, Dr. J.B. Kristiadi selaku Ketua Umum MAPPI dan Jusuf Anwar dari Bapepam, sedangkan dari swasta adalah Piet Haryono dan Anton; (2) Dewan Pengarah AVA secara aklamasi menerima usul Indonesia mengenai: (a) pembentukan Sekretaris Jenderal permanen; (b) penerbitan bulletin berkala untuk bahan informasi para investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan ASEAN; (c) laporan berkala AVA pada ASEAN agar pemerintah masing-masing negara anggota memberikan perhatian terhadap profesi penilai yang terdapat di negaranya; (4) pembentukan Sekjen AVA semula ditentang oleh beberapa peserta karena harus mengubah Anggaran Dasar AVA, akhirnya disepakati untuk perubahan Anggaran Dasar yang akan diselesaikan sebelum Pertemuan AVA ke-6; (5) untuk membentuk Sekjen permanen, Indonesia dan Muangthai telah menyumbang dana masing-masing US\$1.000 dan Singapura US\$500; (6) pengadaan informasi AVA akan memudahkan para investor mengetahui bagaimana memperoleh tanah di suatu negara dan penentuan harganya.

Sekretaris Menteri Keuangan Filipina, Vicente, me-

ngatakan bahwa: (1) kerjasama antar profesi penilai di ASEAN dapat ditingkatkan agar bermanfaat bagi pembangunan di masing-masing negara anggota; (2) kebutuhan jasa penilai di ASEAN telah cukup mendesak mengingat keadaan perekonomiannya yang terus berkembang; (3) peranan jasa penilai di ASEAN dalam masalah pertanahan sangat mendukung program pengembangan kota; (4) jasa penilai di Filipina tidak dapat dipisahkan dari pemerintah maupun pengusaha real estate.

Sementara itu delegasi Indonesia, Piet Haryono, mengatakan bahwa: (1) profesi penilai di Indonesia belum banyak dikenal, dan kehadiran Indonesia dalam pertemuan ini sangat penting untuk mempertinggi kualitas profesi penilai; (2) Indonesia saat ini sedang menggalakkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karenanya dalam penilaian tanah dapat membandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang telah lama memanfaatkan jasa penilai; (3) profesi penilai tidak saja dapat dimanfaatkan dalam penilaian tanah, tetapi juga menilai perusahaan-perusahaan yang akan *go public*, apakah layak atau tidak dan berapa nilai saham yang wajar; (4) jasa penilai banyak membantu untuk menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara; (5) profesi penilai dapat membantu suatu perusahaan yang ingin memperluas investasinya untuk menilai berapa investasi yang dibutuhkan dan berapa kredit yang dapat dimanfaatkan dari bank; (6) bank dapat memperoleh manfaat dari penilai karena mengetahui secara pasti berapa agunan untuk mengamankan kredit yang akan diberikan guna memperluas investasi. Hal ini sangat berguna bagi bank terutama bank milik pemerintah sehingga kekayaan negara dapat diamankan (*Merdeka*, 2-12-1989).

Pertemuan sepakat untuk: (1) menerapkan sistem penilaian yang seragam sehingga memiliki standar yang sama; (2) mendirikan Sekretariat Jenderal AVA permanen yang berkedudukan di Kuala Lumpur, karena Malaysia lebih berpengalaman dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya; (3) mendirikan Kantor Sekjen AVA dengan masing-masing anggota menyumbang US\$1.000, kecuali Singapura US\$500; (4) mendirikan pusat-pusat pendidikan penilai di masing-masing negara anggota melalui kerjasama pemerintah, swasta dan kalangan perguruan tinggi agar profesi penilai benar-benar dapat diandalkan; (5) menunjuk Dirjen Penilaian dari Malaysia, Ravindra Daas dan H. Nawawi, masing-masing sebagai Presiden AVA dan Sekjen AVA, sedangkan Piet Haryono dari Indonesia terpilih sebagai Ketua Umum; (6) menyelenggarakan Pertemuan AVA ke-6 di Kuala Lumpur tahun 1990 (*Merdeka*, 4-12-1989).

Penasihat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Jusuf Anwar, mengatakan kepada pers tanggal 3 Desember 1989 bahwa: (1) beberapa faktor yang membuat profesi penilai di Indonesia berpeluang cukup baik adalah: (a) meningkatnya arus penanaman modal dari negara-negara industri ke negara-negara ASEAN; (b) meningkatnya kegiatan pasar modal di Indonesia akhir-akhir ini; (2) tenaga penilai yang profesional hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan formal, untuk itu GAPPI sedang menyiapkan suatu pendidikan tingkat sarjana dan sarjana muda; (3) profesi penilai harus mampu meningkatkan citra yang baik dengan membentuk kode etik sebagai aturan main yang harus ditaati; (4) keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan AVA ke-5 untuk menimba pengalaman dan saling tukar informasi mengenai jasa penilai antar ASEAN (*Merdeka*, 5-12-1989).

#### E. PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Para Ahli Penanggulangan Bencana Alam ASEAN mengadakan pertemuan di Manila tanggal 13-15 Desember 1989 untuk: (1) mengkaji seberapa jauh kecenderungan bencana alam di negara-negara ASEAN; (2) mencari penemuan baru atau cara penanggulangan dan persiapan guna menghadapi bencana alam; (3) saling tukar menukar pengalaman dalam penanganan bencana alam yang telah terjadi; (4) saling membantu jika sebuah negara terkena bencana alam dengan bantuan teknik dan fisik (*Merdeka*, 12-12-1989).

#### IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DI LOG

##### A. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

###### 1. Kerjasama Energi

Pada awal bulan Januari 1990, Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) dan Badan Sumber Daya Alam Jepang akan mengirim misi energi ke negara-negara ASEAN untuk mempromosikan pengembangan dan penggunaan sumber-sumber energi bebas polusi. Tujuan pengiriman adalah untuk membantu negara-negara ASEAN yang mengalami perkembangan industri yang memerlukan banyak energi. Diperkirakan bahwa pada tahun 2000 kebutuhan tenaga listrik naik 2,4 kali dari tingkat sekarang. Bantuan teknologi penghematan energi juga akan dibicarakan (*Antara*, 4-12-1989).

## 2. Kerjasama Kebudayaan

Konsul Muda Jepang, Katsuthosi Miyakawa, mengatakan di Medan tanggal 22 Desember 1989, bahwa: (1) pada tanggal 10 Januari 1990 sebuah organisasi kebudayaan Jepang akan membuka Pusat Kebudayaan ASEAN di Tokyo; (2) gagasan pembentukan pusat kebudayaan ini diajukan kepada pemerintah Jepang oleh sebuah misi budaya tingkat tinggi negara-negara ASEAN November 1987; (3) fungsi utama pusat kebudayaan itu adalah untuk memperlancar masuknya kebudayaan negara-negara Asia; (4) pusat kebudayaan itu akan menyediakan informasi tentang kebudayaan negara-negara ASEAN dan diharapkan menjadi titik temu para seniman ASEAN (*Antara*, 23-12-1989).

## 3. Seminar "Dampak Pembentukan Pasar Baru Eropa Terhadap Peran Ekonomi Jepang di Asia Tenggara"

Dalam seminar sehari dengan judul "Dampak Pembentukan Pasar Baru Eropa terhadap Peran Ekonomi Jepang di Asia Tenggara" yang diselenggarakan oleh Centre for Japanese Studies di Gedung Unas Jakarta, tanggal 21 Desember 1989, Heru Utomo Kuntjoro-Jakti, Ph.D. mengatakan bahwa: (1) perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara Eropa Timur dan rencana pembentukan pasar tunggal Eropa merupakan fenomena-fenomena awal dari perubahan global dunia yang menjurus ke arah banyak kutub dan relativisasi banyak hal di bidang ekonomi; (2) Jepang, ASEAN dan negara di luar Eropa akan menghadapi tantangan berat, karena perubahan ke banyak kutub itu dibarengi dengan trend terbentuknya kubu ekonomi regional seperti Pasar Eropa 1992 nanti.

Bob Widyahartono memperkirakan akan terbentuknya beberapa sistem ekonomi regional yang terdiri dari Jepang, Pasar Eropa yang diperluas, Group AS, Kanada dan Meksiko, COMECON, serta RRC. Semua sistem regional akan bergerak menuju sistem pasar bebas dan terlepas dari ikatan-ikatan ideologis. Dengan sistem sentralisasi tertutup seperti sekarang ini, RRC tidak mungkin bertahan menghadapi sistem terbuka yang melanda Eropa Timur. Akibat terbentuknya sistem ekonomi tersebut, peran ASEAN akan semakin menguat dan keberhasilan ASEAN cukup membuat Jepang percaya diri untuk menghadapi pasar bersama Eropa. Di samping itu dia juga menjelaskan komparasi tentang pertumbuhan ekonomi beberapa negara, seperti ASEAN 4,2%, Jepang 4%, Eropa Barat 1,5%, semen-

tara pertumbuhan dunia rata-rata sekitar 2% (*Pelita*, 22-12-1989).

## B. HUBUNGAN ASEAN-MEE

*European Community (EC) Commission* bekerjasama dengan Komite Gabungan Penanaman Modal EC-Indonesia menyelenggarakan lokakarya di Jakarta tanggal 23-24 November 1989 tentang penanaman modal di sektor-sektor industri tertentu, untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara yang tergabung dalam *European Community* dan ASEAN.

Emmanuel Merch dari *The Commission of the European Communities* mengatakan bahwa: (1) lokakarya didasarkan pada proposal-proposal proyek tertentu yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan dan rencana penanaman modal di negara yang dituju; (2) peserta terbatas hanya bagi perusahaan di Eropa dan ASEAN yang menunjukkan minat untuk bekerja sama dan bertujuan mewujudkan kerjasama penanaman modal industri di negara-negara ASEAN.

Kerjasama antara Eropa dan ASEAN diwujudkan dalam bentuk: (1) penanaman modal untuk usaha bersama; (2) perijinan teknologi; (3) perluasan fasilitas produksi untuk persaingan yang lebih efektif; (4) pengadaan sasaran-sasaran ekspor baru; (5) penyusunan bentuk-bentuk pemasaran yang baru serta bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan maksud tujuan dari perusahaan tersebut.

John Leech Ketua Rural Investment Overseas Ltd. (RIO) dari Inggris mengatakan bahwa: (1) Lokakarya akan menjadi wahana kerjasama negara-negara ASEAN dan Eropa; (2) para ahli akan hadir untuk membantu memberikan informasi-informasi tentang insentif-insentif EC dan ASEAN, sistem perundang-undangan dan pajak, serta saran-saran dari pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bersama; (3) EC akan memberikan bantuan biaya penelitian dan modal; (4) ada peluang memperoleh kemudahan-kemudahan di pasaran ASEAN melalui preferensi tarif yang layak (*Business News*, 13-11-1989).

## C. HUBUNGAN ASEAN-KANADA

Pertemuan Komite Kerjasama atau *Joint Committee Corporation (JCC)* ke-6 ASEAN-Kanada berlang-

sung di Bandar Seri Begawan Brunei, tanggal 21-22 November 1989, dihadiri oleh 51 pejabat dan 24 pengusaha, mengenai perluasan kerjasama ekonomi untuk: (1) menyusun rencana kerjasama di masa mendatang; (2) meninjau kemajuan proyek-proyek yang sedang berjalan yang melibatkan Kanada dan ASEAN; (3) merencanakan peningkatan kerjasama perdagangan, industri dan pembangunan.

Pejabat pada Kemlu Brunei, Yusof Abdul Hamid, mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa para pengusaha Kanada sepatutnya memanfaatkan iklim usaha maju di wilayah ASEAN untuk meningkatkan perdagangan kedua belah pihak (*Antara*, 22-11-1989).

#### D. HUBUNGAN ASEAN-ASIA PASIFIK

##### *Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC)*

Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berlangsung di Canberra tanggal 6-7 November 1989, dihadiri oleh 300 orang yang mewakili 12 negara ASEAN, AS, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang dan Australia untuk membahas pertumbuhan dan kerjasama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas, selaku Ketua Panitia Tetap ASEAN mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) negara-negara di Asia-Pasifik agar bertindak hati-hati dan tidak tergesa-gesa untuk membentuk sebuah forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik serta jangan mengambil keputusan berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya mengikat seluruh negara peserta. Forum jangan sampai mengarah kepada pengesahan kebijaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara peserta; (2) ASEAN bersedia membaur dalam proses konsultasi yang konstruktif untuk mempersiapkan era baru kerjasama ekonomi Asia-Pasifik dengan berlandaskan kepada saling ketergantungan, kesamaan kesempatan dan keuntungan; (3) negara-negara di Asia-Pasifik perlu mendalami kemungkinan pengembangan modalitas yang efektif bagi kerjasama ekonomi.

Menteri Perdagangan Thailand, Dr. Subin Pinkayan, sebagai Ketua Forum Menteri Ekonomi ASEAN mengatakan bahwa: (1) setiap upaya pengembangan kerjasama jangan sampai mengganggu identitas dan kohesi ASEAN; (2) kerjasama yang ingin ditingkatkan harus terpusat pada masalah-masalah ekonomi (*Antara*, 6-11-1989).

Dalam pertemuan itu terdapat beberapa perbedaan pandangan seperti antara ASEAN dan Jepang. ASEAN belum setuju dan menganggap belum perlu mengikutkan Cina, Taiwan dan Hongkong dalam forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik itu. Sedangkan Jepang yang diikuti oleh Australia ingin memasukkan ketiga negara itu ke dalam konsultasi dan diskusi mengenai peningkatan ekonomi di Asia-Pasifik (*Antara*, 6-11-1989).

Menteri Industri dan Perdagangan Jepang, Hikaru Matsunaga, mengatakan bahwa: (1) pola pembangunan ekonomi harus berubah dari situasi ketergantungan pasar AS ke situasi ketergantungan antar negara kawasan; (2) Jepang bersedia mendorong upaya peningkatan ke arah diversifikasi pasar dengan memperbaiki akses pasar dan peningkatan bantuan ekonomi; (3) kerjasama hendaknya dilakukan secara bertahap agar mencerminkan adanya kepentingan bersama; (4) peningkatan penanaman modal dan alih teknologi menjadi perhatian Jepang (*Antara*, 7-11-1989).

Antara tanggal 6 November 1989 memberitakan sebagai berikut: (1) ASEAN akan menentang setiap usaha untuk membahas pembentukan suatu blok ekonomi regional versi Asia-Pasifik; (2) keikutsertaan ASEAN dalam Pertemuan Tingkat Menteri Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Canberra tanggal 6 November 1989 bukan berarti bahwa negara-negara anggota ASEAN mendukung konsep APEC; (3) ASEAN menyadari arti pentingnya mempererat kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara Asia-Pasifik mengingat kemampuan wilayah ini terus meningkat dan juga sebagai persiapan menghadapi rencana penyatuan pasar Eropa; (4) ASEAN lebih dulu telah dihindari kekhawatiran bahwa susunan suatu blok ekonomi regional pasti hanya akan menguntungkan kepentingan ekonomi negara-negara maju dan mungkin dapat merusak persatuan dan keutuhan ASEAN; (5) ketidakhadiran beberapa Menteri Luar Negeri dan Perdagangan negara anggota ASEAN pada Pertemuan Canberra mencerminkan kecurigaan ASEAN mengenai niat nyata negara-negara maju yang ikut dalam pertemuan itu.

Menlu Jepang, Taro Nakayama, mengatakan di Canberra tanggal 6 November 1989 bahwa: (1) kualitas pembangunan sangat tergantung pada kualitas manusia; (2) untuk peningkatan kemampuan perlu mengikutsertakan kalangan swasta, dan prioritas lain yang perlu ditangani adalah mengatasi situasi ekonomi dan menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan sektor swasta.

Meskipun tidak tercapai kesepakatan tentang langkah-langkah strategis dan mendasar tentang struktur kerjasama dan mekanisme pendukung kelancaran kerjasama, pertemuan itu setuju untuk meneruskan konsultasi.

Mereka juga sepakat untuk memfokuskan kerjasama di bidang investasi, peralihan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan empat bidang program kerja yang disetujui meliputi: (1) studi ekonomi yang menganalisa dan menelaah kembali pandangan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik; (2) liberalisasi perdagangan; (3) investasi peralihan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia; (4) kerjasama sektoral dalam bidang-bidang turisme, energi, promosi perdagangan dan masalah alam lingkungan.

Prinsip-prinsip dasar yang disetujui dalam pertemuan itu meliputi: (1) sasaran untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan di kawasan Asia-Pasifik, yang akan dapat memberikan sumbangan pada ekonomi dunia; (2) mengakui perbedaan-perbedaan yang ada di kawasan Asia-Pasifik, termasuk perbedaan sosial dan ekonomi; (3) kerjasama harus mencakup komitmen pada dialog terbuka dan konsensus yang menghormati pendapat masing-masing; (4) kerjasama harus berdasarkan pertukaran pandangan yang konsultatif dan non-formal; (5) APEC harus terfokus pada isu-isu ekonomi dan untuk menguatkan sistem perdagangan multilateral serta tidak boleh membentuk suatu blok; (6) kerjasama itu harus meningkatkan keuntungan dari interdependensi, baik untuk kawasan maupun dunia; (7) kerjasama harus *complement* (*Kompas*, 8-11-1989).

Menlu Ali Alatas, mengatakan pada jumpa pers tanggal 7 November 1989 bahwa: (1) ASEAN tidak bermaksud memonopoli dan memaksakan cara hidupnya kepada negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik; (2) forum kerjasama regional yang sudah ada seperti mekanisme ASEAN-PMC, perlu dimanfaatkan; (3) ASEAN tidak bermaksud memperkecil arti kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (*Antara*, 7-11-1989).

Ketua Pertemuan Menlu Gareth Evans mengatakan kepada pers bahwa: (1) para Menteri dari ke-12 negara peserta menganggap terlalu dini untuk memutuskan struktur sebuah forum tingkat menteri; (2) pertemuan selanjutnya akan dilangsungkan di Singapura pertengahan 1990 pada tingkat konsultasi; (3) belum ada kesepakatan keikutsertaan Cina, Taiwan dan Hongkong; (4) sumbangan ASEAN dan mitra dialognya terhadap

perkembangan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik merupakan hal yang penting; (5) perlu adanya peningkatan negosiasi-negosiasi perdagangan multilateral (*Antara*, 7-11-1989).

Seusai menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha, tanggal 14 November 1989, Menteri Perindustrian Hartarto mengatakan bahwa: (1) para pengusaha Indonesia agar mempersiapkan diri untuk menghadapi kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (2) peluang bisnis bagi pengusaha Indonesia terletak pada ekspor non-migas; (3) para pengusaha Indonesia agar meningkatkan mutu produk dan aktif mencari mitra usaha.

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) secara politis pertemuan dinilai cukup berhasil; (2) meskipun telah tercapai pengertian yang jelas mengenai posisi ASEAN, usul ASEAN mengenai mekanisme ASEAN-PMC belum diterima; (3) ASEAN bersatu sikap dalam pertemuan (*Antara*, 14-11-1989).

#### E. HUBUNGAN ASEAN-PBB

Dalam siaran persnya tanggal 3 November 1989, Kantor Perwakilan UNDP di Jakarta menyatakan: (1) Sekjen Sekretariat ASEAN, Rusli Noor atas nama ASEAN dan Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Galal M. Magdi, menandatangani dokumen ASEAN-UNDP tentang proyek kerjasama teknik untuk mendukung upaya penegakan hukum guna memerangi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika; (2) untuk itu UNDP memberi bantuan dana US\$200.000 (*Antara*, 3-11-1989).

#### F. HUBUNGAN ASEAN-AMERIKA LATIN

Pada tanggal 14 Desember 1989, juru bicara pemerintah Thailand, Suvit Yodmani, mengatakan bahwa: (1) Thailand dan Meksiko sepakat bahwa ASEAN dan Kelompok Tujuh Negara Amerika Latin perlu memperbanyak komunikasi; (2) kerjasama ekonomi, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan penerbangan perlu ditingkatkan; (3) perlu diselenggarakan Pertemuan para Menlu ASEAN dan Kelompok Tujuh Negara Amerika Latin; (4) Thailand dan Meksiko sepakat mengadakan pertukaran teknologi petrokimia; (5) pembukaan Kedutaan Besar Meksiko di Thailand merupakan langkah peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan (*Antara*, 16-12-1989).

## V. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

### A. RENCANA PERTEMUAN PERDAMAIAN KAMBOJA

Dalam rangka membuka kembali perundingan perdamaian Kamboja, PM Chatichai Choonhavan mengatakan di Bangkok tanggal 1 November 1989 bahwa: (1) empat faksi Kamboja yang bertikai, agar mengadakan pembicaraan informal untuk membahas pembentukan mekanisme pengawasan internasional guna memeriksa penarikan pasukan Vietnam dan mengawasi penyelesaian politik di Kamboja; (2) pertemuan informal itu hendaknya menitikberatkan pada pemeriksaan pasukan, penghentian bantuan militer dari pihak luar dan penetapan gencatan senjata, serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan sementara.

Himbauan PM Chatichai Choonhavan ini didukung oleh Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, meskipun ada beberapa pendapat yang menentanginya karena pertemuan itu dianggapnya dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh (*Antara*, 1-11-1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pertemuannya dengan Kelompok Kerja PWI Pusat Bidang Luar Negeri di Jakarta 1 November 1989 bahwa: (1) rencana pertemuan informal tentang Kamboja bukan merupakan kelanjutan dari JIM, oleh sebab itu tidak dapat disebut JIM III; (2) penamaan JIM III untuk pertemuan informal dapat menimbulkan anggapan bahwa pertemuan itu dilakukan dalam kerangka dua JIM sebelumnya, sehingga dapat dinilai sebagai kemunduran; (3) dia dan Menlu Roland Dumas selaku Ketua ICK bersedia untuk membantu usaha mengadakan konsultasi dengan peserta konperensi dalam jangka waktu enam bulan untuk menentukan waktu dimulainya kembali konperensi di Paris; (4) pihak-pihak yang bersengketa agar segera kembali ke meja perundingan (*Kompas*, 2-11-1989).

Dutabesar Vietnam untuk Muangthai (Thailand), Le Mai, mengatakan di Bangkok tanggal 7 November 1989 bahwa: (1) Pertemuan Jakarta itu agar diselenggarakan pada bulan Desember 1989; (2) Vietnam mendukung kebijaksanaan Thailand untuk mengubah medan pertempuran menjadi lokasi pasar (*Kompas*, 9-11-1989); (3) Phnom Penh siap membahas masalah mekanisme pengawasan internasional, gencatan senjata dan pengawasan pemilu, tetapi menolak pembentukan pemerintahan sementara yang mengikutsertakan ketiga faksi perlawanan Kamboja, termasuk Khmer Merah; (4) jika

dalam Pertemuan Jakarta dicapai persetujuan, Phnom Penh bersedia mempertimbangkan keikutsertaan Khmer Merah (*Suara Karya*, 11-11-1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan di Jakarta tanggal 14 November 1989 bahwa: (1) dua pemimpin kelompok yang tergabung dalam Pemerintahan Koalisi Perlawanan Kamboja (CGDK), Pangeran Sihanouk, yang dalam hal ini diwakili oleh Pangeran Norodom Ranaridh dan Son San, Vietnam dan PM Kamboja dukungan Vietnam, Hun Sen, akan hadir dalam Pertemuan Jakarta (*Antara*, 16-11-1989).

Pada tanggal 16 November 1989, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Ho The Lan, mengemukakan agar negara peserta pertemuan dibatasi jumlahnya (*Angkatan Bersenjata*, 18-11-1989).

Menlu Ali Alatas, mengatakan di Jakarta tanggal 23 November 1989 bahwa: (1) pertemuan tidak akan menggunakan pendekatan parsial; (2) pembatasan jumlah peserta pertemuan informal dimaksudkan untuk menjaga proses negosiasi yang sejak Konperensi Paris sampai sekarang belum berhasil mencapai penyelesaian menyeluruh (*Antara*, 23-11-1989).

Juru bicara militer Thailand, Letjen Narudol Dejpradiyuth, mengatakan di Aranyaprathet 29 November 1989 bahwa: (1) empat kelompok perlawanan Kamboja setuju untuk menghadiri pertemuan informal; (2) pada tanggal 7 November 1989 ketiga pemimpin faksi perlawanan Kamboja mengirim surat kepada Menlu Ali Alatas, yang menyatakan kesediaannya untuk menghadiri babak perundingan baru di Jakarta dengan beberapa syarat (*Antara*, 30-11-1989).

Sementara itu Presiden Perancis, Francois Mitterrand, mengatakan di Paris 1 Desember 1989 bahwa: (1) untuk menghentikan kerusuhan di Kamboja harus ada penyelesaian secara menyeluruh; (2) keputusan harus dikembalikan pada penduduk setempat tentang keinginan mereka atas masa depannya; (3) Perancis selama ini telah berjuang keras untuk melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang bersengketa (*Merdeka*, 2-12-1989).

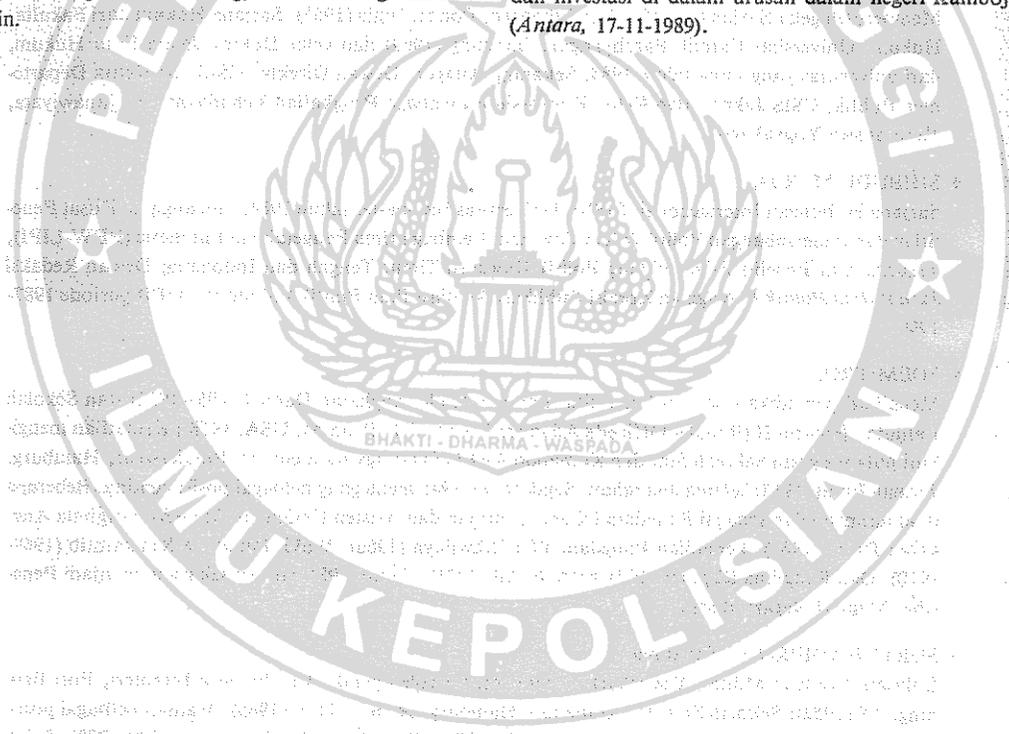
### B. USAHA ASEAN LEWAT PBB

Dutabesar RI untuk PBB, Nana S. Sutresna, mengatakan di New York tanggal 15 November 1989 bahwa: (1) kekhawatiran akan kembalinya Khmer Merah tidak beralasan samasekali. Dalam pemilu yang bebas dan jujur rakyat Kamboja dapat menentukan apa yang ingin

mereka lakukan atas Khmer Merah; (2) semua faksi Kamboja perlu diikutsertakan dalam suatu pemerintahan transisi (*Antara*, 16-11-1989). Pada hari berikutnya dia mengatakan bahwa: (1) semua pihak agar meningkatkan segala usaha untuk mencapai penyelesaian politik di Kamboja; (2) konflik dan pertempuran yang terus-menerus di Kamboja membawa ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara; (3) Kamboja merupakan negara yang hak-hak rakyatnya belum diakui untuk menentukan masa depannya sendiri (*Kompas*, 17-11-1989).

Majelis Umum PBB, tanggal 16 November 1989, menyerukan penyelesaian politik menyeluruh bagi masalah Kamboja dengan diterimanya rancangan resolusi yang dipraksai oleh ASEAN dan 73 negara lainnya, dengan 124 negara mendukung, 17 menentang dan 12 abstain.

Resolusi itu memberi jaminan kepada rakyat Kamboja untuk menentukan sendiri masa depannya, dan jaminan internasional bagi pemulihan kemerdekaan, kedaulatan dan kenetralan serta sifat non-blok Kamboja. Dengan resolusi itu PBB akan menekankan setiap penyelesaian menyeluruh bagi masalah Kamboja, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) penarikan mundur semua pasukan asing, di bawah pengawasan dan pengendalian PBB; (2) pembentukan pemerintahan sementara; (3) rekonsiliasi nasional di bawah Pangeran Sihanouk; (4) tidak berkuasanya kembali Khmer Merah; (5) dipulihkan dan dipertahankannya kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah serta status Kamboja yang netral dan non-blok; (6) hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri; (7) komitmen dari semua negara untuk tidak melakukan campur tangan dan investasi di dalam urusan dalam negeri Kamboja (*Antara*, 17-11-1989).



## Para Penulis

- **HARDI,**  
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1950); kemudian mengikuti program Post Graduate Student pada Ruskin College, Oxford, England (1951-1952). Sejak tahun 1945 memegang pelbagai posisi penting, antara lain Anggota DPR: 1957-1959 dan 1966-1968. Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1968-1976) dan mantan Duta Besar RI di Republik Sosialis Vietnam (1976-1980). Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia (1963-1970). Sekarang tetap aktif sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial Politik Universitas Darma Agung, Medan, sejak tahun 1981.
- **PRANARKA, A.M.W.,**  
Memperoleh gelar Sarjana Filsafat dari Athenaeo, Poona, India (1965); Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1969) dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, dari universitas yang sama tahun 1984. Sekarang Anggota Dewan Direktur CSIS dan Ketua Departemen Politik, CSIS Jakarta dan Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta.
- **SIHBUDI, M. Riza,**  
Sarjana Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia, tahun 1984; kini anggota Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik & Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPW-LIPI), Jakarta, Staf Peneliti dalam bidang Politik Kawasan Timur Tengah dan Indonesia; Dewan Redaksi *Jurnal Ilmu Politik* & Anggota Komisi Publikasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) periode 1987-1990.
- **SOEMITRO,**  
Mengikuti pendidikan pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat I (1951-1952) dan Sekolah Lanjutan Perwira II (Regular Officer's Advance Course, FT. Benning, USA, 1958); Kemudian mengikuti pula program Sekolah Staf dan Komando ABRI (Fuerungs Akademi der Bundeswehr, Hamburg, Jerman Barat, 1963) selama dua tahun. Sejak tahun 1945 memegang pelbagai posisi penting. Beberapa di antaranya ialah sebagai Pangdam IX Mulawarman dan Asisten II/Operasi Menteri Panglima Angkatan Darat (1965); kemudian Pangdam VIII Brawijaya (1966); Wakil Panglima Kopkamtib (1969-1970). Dan Panglima Kopkamtib/WAPANGAB (1971). Tahun 1981 sampai sekarang menjadi Penasihat Menteri Negara Ristek.
- **SURYOHADIPROJO, Sayidiman,**  
Lulusan Akademi Militer, Yogyakarta (1948); memperoleh pendidikan Perwira Infanteri, Fort Benning, AS (1952); Sekolah Staf dan Komando, Hamburg, Jerman Barat (1965). Mantan pelbagai posisi penting, antara lain Gubernur Lemhanas (1974-1978), Duta Besar RI di Jepang (1979-1983). Sejak 1983 hingga sekarang Penasihat Menristek, juga menjadi dosen Ketahanan Nasional pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- **WANANDI, Jusuf,**  
Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta (1960). Pada tahun 1964 menjadi dosen di fakultas dan universitas yang sama. Tahun 1977: Congressional Fellow yang disponsori oleh American Political Science Association (APSA). Kini Ketua Dewan Penyantun dan Anggota Dewan Direktur CSIS; Anggota, Board of Governors, East-West Center, Honolulu; Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Kerjasama Ekonomi Pasifik.